

**KEPENTINGAN BRAZIL MENOLAK *CREDENTIAL LETTER* INDONESIA
DALAM KASUS EKSEKUSI MATI SINDIKAT NARKOBA INTERNASIONAL
TAHUN 2015.**

Oleh:

Juli Haiga

Pembimbing : Faisal Rani S,ip Msi.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional- Prodi Hubungan Internasional- Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kmapus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study analyzes the interests of Brazil Refuses Indonesia Credential Letter Dead In Case Execution Drug Syndicate International Year 2015. The rate of drug crimes in Indonesia have continued to rise, followed by the type of drug and the modus operandi vary continuously changing. Indonesia has become the target of an international drug syndicate. The administration of President Jokowi matiter establish penalties against drug cases. The policy raises the pros and cons, especially in the country of origin of the convict. Brazil has sentenced two citizens to the dictates of the maliter.

Drug syndicate case involving the Brazilian Marco Archer Cardoso Moreira was caught 13,4 kg of cocaine August 2003 in Banten and RedirgoGuarte smuggle cocaine hidden in her surfboard weighing 19 kilograms July 2004 in Banten.

The theory put forward is about the interests of the country. This research topic is the existence of other instruments used to achieve political purposes that utilizes a special report from Amnesty International. Another theory used in this study is Diplomacy. Brazil made a mistake by refusing Credential letter Indonesia with Indonesia cornerstone of the death penalty against citizens in drug cases. It is the theory of diplomacy is a violation of the code of conduct diplomacy.

Keywords: *Brazil, Credential letter, Ethics Diplomacy, Indonesia, National Interest*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menganalisa mengenai kepentingan Brazil menolak *credential letter* Indonesia dalam kasus eksekusi mati sindikat narkoba internasional tahun 2015. Penulis dalam penjelasan ini menerangkan mengenai data kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang melibatkan warga negara asing. Indonesia merupakan daerah strategis untuk perdagangan Narkoba sindikat Internasional. Kasus perdagangan Narkoba yang melibatkan warga Brazil bukan hal pertama yang telah terjadi di Indonesia.

Kasus sindikat narkoba yang melibatkan warga Brazil yaitu Marco Archer Cardoso Moreira tertangkap menyeludupkan 13,4 kg kokain pada bulan Agustus 2003 di Banten dan menjalankan masa hukuman selama 10 Tahun.¹ Marco berprofesi sebagai pilot. Hal yang menjadikan dirinya terlibat peyeludupan tersebut adalah tuntutan ekonomi hidup di negara luar. Marco mengalami kecelakaan gantole di Bali sehingga harus dirawat di Singapore. Kecelakaan tersebut menyebabkan banyak tulangnya patah maka tubuh Marco di penuhi oleh plat-plat. Biaya pengobatan yang mahal tersebut Marco jatuh bangkrut dan terlilit hutang dan menjadi kurir narkoba.

Kasus narkoba lainnya yang melibatkan warga Brazil yaitu Redrigo Gualarte. Redirgo menyeludupkan kokain yang disembunyikan di dalam papan

selancarnya seberat 19 kilogram pada Juli 2004 di Banten sama halnya dengan Marco, Warga Brazil tersebut menjalani hukuman penjara selama 10 tahun.² Kedua tersangka kasus narkoba tersebut difonis hukuman mati. Ketegasan hokum Indonesia tersebut berbagai kritikan datang dari negara tersangka yaitu Brazil. Brazil meinta Indonesia untuk menyetujui permohonan grasi terhadap warga negaranya. Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa hukuman mati terhadap sindikat narkoba adalah kepentingan nasional negara demi mewujudkan negara bebas narkoba karena Indonesia mengalami status darurat narkoba.

Rumusan Masalah

Indonesia terlibat dalam sengketa diplomatik dengan Brazil yang 2 warga negaranya merupakan anggota jaringan perdagangan narkoba internasional dan dijadwalkan dieksekusi mati.

Brazil menyatakan kekecewaan dalam kasus eksekusi seorang warga negara dan rencana eksekusi satu orang lainnya. Seorang warga Brazil lainnya, Rodrigo Gualarte dijadwalkan untuk dieksekusi mati di Indonesia atas pelanggaran hukum yang sama. Presiden Indonesia diminta untuk meneliti kasus-kasus terpidana mati sebelum membulatkan sikap untuk menolak permohonan *grasi*. Hal ini terlihat dengan upaya hukum yang diberikan kepada terpidana mati sebelum eksekusi itu dilakukan. Beberapa negara pun terlihat mengajukan *grasi* kepada pemerintah Indonesia agar warga negaranya

¹Diakses dari <http://www.kompasiana.com/hansharyadi/unto-ld-story-of-marco> kisah-tragis-terpidana-mati-kasus-narkoba_54f90bc2a33311ce308b4b29, pada 13 Maret 2016.

² Diakses dari, <http://news.detik.com/read/2015/01/03/162828/2793267/10/putusan-mk-soal-pk-berkali-kali-diubah-ini-kata> menko-tedjo, pada 25 Maret 2016.

diberikan keringanan hukum. Ketegasan penerapan hukuman mati merupakan hak negara dan tak bisa diintervensi oleh negara luar.

Berdasar penjelasan diatas ditarik sebuah pertanyaan penelitian bahwa :

“Apa alasan Brazil menolak credentials Dubes Indonesia dalam kasus eksekusi mati sindikat narkoba internasional tahun 2015?”

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif kepentingan Brazil menolak *credential letter* Dubes Indonesia dalam kasus eksekusi mati Sindikat narkoba internasional tahun 2015
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai alasan Brazil menolak *credential letter* Dubes Indonesia dalam kasus eksekusi mati sindikat narkoba internasional tahun 2015.

Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat ekplanatif, yaitu berusaha menerangkan masalah yang diteliti dengan menjelaskan keadaan dan hubungan antar objek penelitian secara aktual berdasarkan fakta dan data yang jelas. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder yang

berbasis pustaka yang dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menyadur berbagai sumber dari penelitian-penelitian ilmiah berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang diterbitkan di website, majalah, bulletin, jurnal, surat kabar serta bahan lain yang mendukung.

Kerangka Teoritis

Menganalisa masalah di dalam penelitian ini maka keberadaan teori menjadi faktor yang utama untuk membantu penelitian. Fungsi teori bagi penulis untuk menjelaskan kepentingan dari organisasi internasional menjalin hubungan dengan pemerintah atau non-pemerintah. Khusus kasus ini penulis fokus terhadap hubungan antara organisasi pemerintahan dengan Negara. Menganalisa suatu teori diperlukan pemahaman mengenai tingkat dan unit analisis untuk membantu menjelaskan titik persoalan sebenarnya. Penulis lebih memahami dan menemukan pandangan yang benar untuk mengungkapkan teori yang sebenarnya sesuai kasus yang diteliti.

Terdapat lima tingkat analisis didalam menelaah unit analisa yang ditulis oleh Mohtar Mas'od dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Lima di antaranya yaitu : Analisa Individu, Kelompok, Negara-Bangsa, Pengelompokan Negara-Negara, dan Sistem Internasional. Penelitian ini memfokuskan untuk menggunakan pengelompokan Negara-Negara

Mohtar Mas'od menjelaskan bahwa teori merupakan bentuk penjelasan umum yang dapat menjelaskan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa teori adalah

serangkaian konsep yang menjadi bentuk penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep lainnya secara logis berhubungan untuk menentukan suatu fenomena.³ Akhirnya penulis menggunakan teori diplomasi oleh SL. Roy. Diplomasi dilaksanakan dengan kode etik yang cukup rumit dan terus berubah sesuai dengan perkembangannya. Adanya kode etik ini ditujukan untuk memperlancar proses diplomasi dan mengurangi perdebatan mengenai hal-hal terkait upacara dan pengaturannya. Wakil diplomatik di buat secara berurutan ditujukan untuk mencegah penghinaan dalam kegiatan misi diplomatik, yakni tentang siapa yang memiliki wewenang dan gelar lebih tinggi. Pembakuan aturan ini menjadi tanda bahwa institusionalisasi diplomasi telah mengalami kemajuan yang besar. Hak legasi atau pembukaan hubungan diplomatik membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga negara penerima perwakilan diplomatik memiliki hak untuk menetapkan peraturan mengenai kedudukan secara hukum dan kegiatan diplomat di negaranya.

Pejabat diplomatik tersebut ditunjuk berdasar konstitusional suatu negara. Misi diplomatik merupakan hal resmi dan berkaitan dengan negara lain, yang bertujuan menjalin hubungan baik dan mutualisme bagi kedua belah pihak. Diperlukan orang yang tepat dan mampu mempertahankan hubungan persahabatan atau hubungan baik antarnegara, sehingga negara penerima berhak memutuskan penerimaan pejabat diplomatik sesuai dengan keinginannya. Penerimaan itu didasari atas kecocokan dan berbagai alasan. Oleh karenanya, memastikan penerimaan seorang pejabat

diplomatik di negara lain pun dilakukan secara prosedural.

Setelah *persona grata*, pejabat diplomatik diberi surat kepercayaan (Credentials Letter) sebagai tanda bahwa pihak berwenang untuk menjalankan tugasnya.⁴ Surat kepercayaan diberikan oleh kepala negara kepada duta besar dan menteri, serta oleh menteri luar negeri kepada kuasa usaha. Dengan berbekal *credentials letter* yang disegel resmi, pejabat diplomatik meminta audiensi dengan kepala negara atau menteri luar negeri di negara penerima segera setelah pejabat diplomatik tiba disana. Penyerahan surat kepercayaan dilakukan secara seremonial, formal, dan ritual. Surat kepercayaan disampaikan melalui pidato dan setelahnya kepala negara penerima memberikan jawaban atas keabsahannya sebagai pejabat diplomatik di negara tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Hubungan Brazil Dan Indonesia

Indonesia dan Brazil menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1953.⁵ Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil secara umum berlangsung baik. Kesamaan kebijakan luar negeri kedua negara yang mengutamakan mekanisme multilateral dalam penanganan berbagai masalah internasional telah memperkuat hubungan dan koordinasi serta saling mendukung antara kedua negara dalam forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil secara umum berlangsung baik dan saat ini memasuki

⁴ Diakses dari "Diplomacy", SL. Roy (1984) hal. 193

⁵ Diakses dari <http://wapedia.mobi/id/Brazil/www.aida-americas.org//>, pada 15 Maret 2016

³ Ibid.

tahapan yang krusial dan strategis. Kesamaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, Kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu regional dan multilateral, usaha penegakan demokrasi dan HAM.

Pemerintah kedua negara melakukan reformasi di berbagai bidang ekonomi dan politik, oleh karena itu kedua negara saling memahami tantangan yang dihadapi masing-masing dalam proses reformasi tersebut. Brazil menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peranan penting bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik. Sejalan dengan politik luar negeri yang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, Pemerintah Brazil mendukung integritas wilayah Indonesia dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemajuan HAM dan demokrasi.

**Kepentingan Brazil Menolak
Credential Letter Dubes Indonesia
Dalam Kasus Eksekusi Mati Sindikat
Narkoba Internasional Tahun 2015**

Presiden Brasil Dilma Rousseff mengatakan tidak mengundurkan diri menghadapi krisis politik terburuk Brazil dua dekade kepemimpinannya. Langkah tersebut mengakibatkan oposisi melakukan tindakan melakukan kudeta melawan pemerintahan demokratis. Dilma menyatakan tidak mengundurkan diri dalam keadaan apapun. Dilma berasumsi tidak melakukan kejahatan yang memperpendek periode kepemimpinannya. Rousseff tersangkut skandal korupsi. Seperti di lansir BBC News, ratusan warga Brazil turun ke jalan meminta Rousseff mundur. Rousseff menegaskan tidak mengundurkan diri. Rousseff menyerukan Mahkamah Agung Brazil untuk tetap memihaknya dalam krisis yang telah mengancam

menggulingkan pemerintahannya. Sementara partai-partai oposisi telah menyerukan kudeta terhadap Rousseff karena diduga memanipulasi rekening pemerintah untuk memungkinkan pemerintah menghabiskan lebih banyak uang saat pemilihan ulangnya pada 2014.⁶ Rousseff tersangkut skandal korupsi yang melibatkan perusahaan minyak negara, Petrobras. Investigasi korupsi Petrobras melibatkan puluhan politisi dalam koalisi Rousseff dan menyebabkan pemenjaraan puluhan eksekutif di perusahaan permesinan seperti Odebrecht. Skandal dan resesi terburuk di Brazil membuat kelangsungan hidup politik presiden perempuan pertama Brazil itu kini bergantung pada mitra-mitra koalisi utamanya di Brazilian Democratic Movement Party (PMDB).

Mengkaji penundaan presiden Dilma menerima *Credential Letter* Dubes Indonesia tentu melihat latar belakang dan suasana politik masing-masing negara. Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Brasil tak bisa lepas dari motif politik yang diemban masing-masing pemimpin negara tersebut dalam mengangkat komoditas politik. Hubungan bilateral Indonesia dan Brazil yang telah lama dan saling menguntungkan tersebut memanas karena intervensi Pemerintah Brazil terhadap hukum Indonesia. Kejahatan pengedaran dan penggunaan narkoba adalah musuh bersama bagi setiap bangsa di dunia, termasuk bagi pemerintah Brazil. Kejahatan yang sama terjadi di wilayah hukum mereka, tentu pemerintahan setempat akan berusaha menegakkan hukumnya secara tegas, begitupun dengan pemerintah Indonesia.

⁶Diakses dari fikes.umm.ac.id "Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Presiden Brasil Lengser" pada 12 April 2016.

Reaksi berlebihan diberikan oleh pemerintah Brazil dengan bersikap agresif terhadap kasus ini, dikhawatirkan menjatuhkan citra dan pandangan dunia internasional terhadap negara tersebut karena dapat dianggap sebagai negara pendukung narkoba serta negara yang tidak menghormati kedaulatan hukum negara lain. Tentu hal ini tidak baik bagi stabilitas politik dan citra pemerintahan dalam negeri dari negara yang bersangkutan. Hubungan baik antar negara akan selalu diupayakan oleh pemerintah Indonesia, dan diharapkan negara-negara lain, khususnya dalam hal ini Belanda, Australia, dan Brazil, akan memberikan timbal balik yang serupa. Mengingat bahwa rusaknya hubungan diplomatik yang selama ini terjalin tentu akan merugikan masing-masing negara. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu mengingatkan sekali lagi, apakah menyelamatkan nyawa satu atau dua orang yang terbukti bersalah dan berpotensi mengancam serta merugikan kehidupan sosial masyarakat, setimpal dengan keuntungan dan berbagai hal baik lainnya yang selama ini telah didapatkan oleh masyarakat masing-masing negara akibat kerjasama yang telah terjalin selama ini. Jika memang demikian, maka ketegasan pemerintah Indonesia adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat bahwa keselamatan rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah dan bagian dari kepentingan nasional Indonesia.

Salah satu rekomendasi yang perlu diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap Brazil adalah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi adalah kerjasama antar negara untuk melakukan pemberantasan narkoba secara bersama-sama. Terjalin hubungan baik antar negara karena memiliki satu tujuan bersama. Selain untuk menjalin

dan menjaga hubungan baik, kerjasama tersebut merupakan upaya preventif untuk mencegah pengedaran dan penggunaan narkoba sehingga keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa bisa terlindungi. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa tindakan ini adalah hal yang baik untuk dilakukan dibandingkan jika antar negara terus berkonflik dan berdebat tanpa memberi keuntungan yang berarti seperti yang telah terjadi selama ini.

Kerjasama yang dilakukan dapat berupa pelatihan bersama mengenai program pendidikan mengenai penindakan kejahatan narkoba, pertukaran informasi, perkuatan jaringan melalui interpol, pertukaran teknologi, pengetatan dan pengawasan bersama wilayah masing-masing untuk membatasi ruang gerak pengedar narkoba. Hal ini tentu akan memberi efek positif karena kepentingan nasional masing-masing negara dapat tercapai akibat kerjasama ini.

Faktor kondisi politik dalam negeri menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah Brazil dalam hal ini para pembuat kebijakan luar negeri Brazil dalam memutuskan suatu kebijakan luar negerinya. Keadaan politik dalam negeri Brazil dalam hal ini sistem pemerintahan Presidensial yang dianut Brazil memungkinkan seorang Presiden membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang dilakukan Brazil dengan memulangkan Dubes adalah kesalahan dalam etika diplomasi serta kesalahan suatu negara untuk mencapai kepentingan politik negaranya. Penjelasan tersebut berdasar kepada semakin berdampak negatif pemerintahan internal Brazil terhadap kepemimpinan Dilma Rousseff dan semakin terungkapnya isu krisis pemerintahan dinegara tersebut. Sikap protes terhadap hukuman mati yang

dilakukan Indonesia terhadap warga Brazil tersebut awalnya untuk menunjukkan bahwa Brazil menjunjung nilai Hak Asasi Manusia tanpa berfikir matang bahwa tindakan menunda credential letter dari Indonesia berdampak pada citra internasional terhadap Brazil memburuk serta menjadikan Brazil melanggar kode etik diplomasi suatu negara terhadap negara lain. Tujuan kepentingan politik Brazil dalam kasus ini penulis menggambarkan bahwa Brazil dinilai salah tindakan. Tindakan seperti ini berdampak terhadap krisis pemerintahan internal Brazil serta kerjasama kedua negara mengalami perubahan jika Brazil tidak segera membenahi sikap terhadap Indonesia.

Penolakan *Credential Letter* Brazil Terhadap Indonesia Dalam Kasus Eksekusi Mati Sindikat Narkoba Internasional Di Tahun 2015

Fungsi perwakilan diplomatik tetap yaitu melaksanakan seluruh tugas yang di berikan oleh negara pengirim di negara penerima sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Tugas-tugas perwakilan diplomatik dirangkum menjadi beberapa bidang yaitu bidang perwakilan, perlindungan, negosiasi, reportasi dan peningkatan hubungan persahabatan. Kedudukan kantor perwakilan Diplomatik Negara pengirim biasanya terdapat di setiap Ibukota Negara penerima, Wilayah Kantor perwakilan diplomatik Negara pengirim di Negara penerima adalah wilayah negara pengirim, Negara penerima tidak berhak menerapkan yurisdiksinya. Negara pengirim juga dapat membuka kantor Perwakilan untuk beberapa negara di satu Negara, sepanjang negara penerima yang menyediakan wilayah tersebut tidak keberatan dan juga sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh Negara-negara tersebut.

Hubungan Internasional dilaksanakan atas suatu dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Hubungan internasional dianggap sangat penting bagi suatu negara. Suatu hubungan internasional dianggap sangat bermanfaat bagi sebuah negara hal ini berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh dengan terjalinnya suatu hubungan internasional. Dewasa ini Hubungan Internasional semakin erat berkat kemajuan teknologi dan informasi yang dimiliki setiap negara hingga lebih memudahkan tiap negara untuk melakukan komunikasi. Adanya hubungan yang tetap dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur eksistensi masyarakat internasional.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba, sebagai bagian dari penegakan hukum positif yang masih berlaku di Indonesia, dan pelaksanaan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negaranegara sahabat sesungguhnya tidak ada kaitannya satu sama lain. Kedaulatan hukum suatu negara harus dihormati, sedangkan hubungan bilateral antarnegara merupakan bagian dari pergaulan antarbangsa yang sudah seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan oleh negara-negara di dunia. Diplomasi antinarkoba yang sudah seharusnya diintensifkan oleh Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral. Diplomasi anti narkoba bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat internasional tentang bahaya ancaman narkoba di Indonesia dan upaya serius Indonesia untuk mengatasinya.

SIMPULAN

Bahaya ancaman narkoba bukan merupakan permasalahan Indonesia semata. Hampir semua negara di dunia menghadapi permasalahan tersebut, dan oleh karena itu upaya untuk mengatasinya harus menjadi kepedulian dan perhatian masyarakat internasional. Adanya pro dan kontra di antara negara-negara di dunia khususnya pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia, yang harus mampu menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hukum positif yang masih berlaku dan ditegakkan oleh Indonesia, dan tidak ada kaitannya dengan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, berbagi informasi mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar undang-undang terkait narkoba di antara negara-negara di dunia harus menjadi bagian yang dikomunikasikan oleh Indonesia dalam diplomasi anti narkoba.

Ketegasan pemerintah Indonesia, dalam hal ini tidak akan dipertanyakan kembali. Karena pemerintah Indonesia berpandangan bahwa hukum harus ditegakkan dan menegosiasikan hukum itu sendiri merupakan pelanggaran hukum. Harapan agar hubungan baik antar negara akan selalu menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Namun, kedaulatan hukum Indonesia sebagai negara merdeka adalah salah satu aspek yang harus dihormati bangsa lain sehingga kerjasama yang baik dapat terjalin. Pernyataan ini diharapkan menjadi sikap resmi pemerintah Indonesia dan diteruskan melalui duta besar maupun diplomat Indonesia di negara-negara sahabat khususnya Brazil. Hal ini sebagai bentuk pernyataan diplomatik pemerintah Indonesia terkait eksekusi terpidana mati warga negara asing di Indonesia sebagai bagian dari

strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga dan melindungi keselamatan rakyat dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Surat kepercayaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sebagai lambang keabsahan atas penugasannya di negara penerima. Hal ini penting untuk diketahui dan dimiliki oleh seorang diplomat atau pejabat diplomatik. Surat ini termasuk dalam tatanan prosedur diplomatik yang telah diciptakan oleh para negarawan sejak dulu, guna menghindari hambatan dan perdebatan dalam tata aturan, serta untuk memperlancar jalannya diplomasi. Terdapat ketentuan khusus terkait penerima surat kepercayaan ini, sebab pejabat diplomatik dipilih langsung berdasar konstitusional negara. Keberadaan surat kepercayaan sebagai salah satu elemen penting pada tatanan prosedur diplomatik menunjukkan bahwa aturan ini telah baku. Artinya, dalam studi diplomasi tentu aturan ini menjadi patokan dari waktu ke waktu dan akan mempengaruhi kode etik diplomasi internasional, sehingga keberadaannya menjadi penting. diplomasi mempelajari negosiasi dan tahapannya, serta strategi dan taktik.

Negosiasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi, sebab pada proses negosiasi inilah suatu negara dapat memperjuangkan kepentingan nasional negaranya. Negosiasi membutuhkan ketelitian dan langkah yang tepat, sehingga tidak dilakukan secara sembarangan. Karena berhubungan dengan kepentingan nasional dua negara maka negosiasi bersifat formal dan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur. Negosiasi dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa pihak yang terlibat bersedia melakukan komunikasi untuk menghasilkan suatu

kesepakatan. Negosiasi juga dapat menjadi pijakan awal untuk membangun suatu kerjasama yang baik.

Kebijakan yang dilakukan Brazil dengan memulangkan Dubes adalah kesalahan dalam etika diplomasi serta kesalahan suatu negara untuk mencapai kepentingan politik negaranya. Penjelasan tersebut berdasar kepada semakin berdampak negatif pemerintahan internal Brazil terhadap kepemimpinan Dilma Rouseff dan semakin terungkapnya isu krisis pemerintahan dinegara tersebut. Sikap protes terhadap hukuman mati yang dilakukan Indonesia terhadap warga brazil tersebut awalnya untuk menunjukkan bahwa Brazil menjunjung nilai Hak Asasi Manusia tanpa berfikir matang bahwa tindakan menunda credential letter dari Indonesia berdampak pada citra internasional terhadap Brazil memburuk serta menjadikan Brazil melanggar kode etik diplomasi suatu negara terhadap negara lain.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Mas'ood, mochtar. 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES

Roy,SL. 1984. "Diplomacy". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abu bakar Eby Hara. 2011. "Pengantar Analisis Politik Luar Negeri; dari Realisme sampai Konstruktivisme": Bandung Nuansa.

Reus-Smit, Christian. 2001 "Constructivism in; Scott Burchill, et al, Theories of International Relations", UK : Palgrave.

Reni, Rukman.2015. "Heboh Bali Nine; Eksekusi Sindikat Narkoba Australia": Ebook.

Budianto, Oetary.1990. "Negara dan Bangsa": Bandung Nuansa.

Suhaidi, Sam.1969. "A Concise History of the Law of Nations": Bandung.

Sastroamidjojo, Ali.1971."Pengantar Hukum Internasional."Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Hartono, Sunaryati. 1991. "Politik Hukum menuju satu Sistem Hukum Nasional."Bandung: Alumni.

Effendi, Mansyur. 1993. "Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas hukum Diplomatik dalam era ketergatanan antara Bangsa." Surabaya: Usaha Nasional.

Atmasasmita, Romli. 1997. "Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Bandung: Gramedia Persada.

Sudarto, 1981. "Kapita Selekta Hukum Pidana".Jakarta: Graha Ilmu.

Syahmin, Ak. 1988. Hukum Diplomatik; Suatu Pengantar". Jakarta: Amico.

JURNAL

Cindy Wockner, Madonna King. *Bali 9: The Untold Story*. Harper Collins, vol. 1 edisi 2008.

UN Human Rights Committee,
Communication vol. 829/1998, 49th sess,
UN Doc CCPR/C/78/D/829/1998 (2003).

Info Singkat Hubungan Internasional :
Diplomasi Anti Narkoba. Vol. VII, No.
05/IP3DI/Maret 2015.

Pasal 13 (ayat 1) Piagam PBB, antara lain Majelis umum diminta untuk memprakarsai studi-studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan Hukum Internasional beserta kodifikasi.

SECRETARIAT “OPEN LETTER ON THE DEATH PENALTY” to Excellency President of Indonesian Joko Widodo 18 February 2015, pada 2 April 2016.
Diakses dari www.Amnesty.org. “Amnesty International, Indonesia: 'Reprehensible' executions show complete disregard for human rights safeguards.” Pada 2 April 2016.

WEBSITE

Diakses dari www.brazilembassy.or.id, pada 20 Maret 2016

Diakses dari http://www.indexmundi.com/brazil/labor_force.html, pada 20 Maret 2016

Diakses dari <http://www.amersur.org.ar/PolInt/PolExBrazil.htm> pada 20 Maret 2016.

Diakses dari http://fealac.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&d=87&Itemid=136&lang=in, pada 23 Maret 2016.

Diakses dari <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7219&l=id> pada 25 Maret 2016.

Diakses dari http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, pada 25 Maret 2016

Diakses dari <http://bnn.go.id/>, “Executive Summary Press Release Akhir Tahun 2015”, pada 25 Maret 2016

Diakses dari http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_07_2014 pada 22 Maret 2016.

Diakses dari www.amnesty.org. “Laporan Amnesty International, Unfinished Business; Police Accountability in Indonesia 2009” pada 3 April 2016.

Diakses dari http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_07_2014.pdf, pada 3 April 2016.

Diakses dari AMNESTY
INTERNATIONAL : INTERNATIONAL